

**ANALISIS PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA MEMBAYAR UPAH LEBIH RENDAH DARI UPAH MINIMUM
PADA WILAYAH KOTA SURABAYA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN KASASI
MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 687/K/PID.SUS/2012)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
gelar sarjana dalam ilmu hukum



Oleh :
NAMA : AA MUHAMAD ZAENUDIN
NIM : 1307350053

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"
JAKARTA
2017**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

NAMA : AA MUHAMAD ZAENUDIN
NIM : 1307350053

JUDUL :

***“Analisis Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana
Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Pada Wilayah
Kota Surabaya Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah
Agung RI Nomor : 687/K/Pid.Sus/2012)***

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan,

Jakarta.....

Pembimbing,

Dr. Gindo.L. Tobing SH.,MH

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

***“Analisis Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana
Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Pada Wilayah
Kota Surabaya Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah
Agung RI Nomor : 687/K/Pid.Sus/2012)***

Telelah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan strata satu (S-1).

Pembimbing,

Dr. Gindo.L. Tobing SH.,MH

Skripsi ini telah diserahkan kepada sekretariat program strata satu ilmu hukum sekolah tinggi ilmu hukum “IBLAM” dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan strata satu (S-1).

Jakarta.....

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”
Pembantu Ketua I,

.....

Ketua,

.....

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

NAMA : AA MUHAMAD ZAENUDIN
NIM : 1307350053

JUDUL :

***“Analisis Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana
Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Pada Wilayah
Kota Surabaya Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah
Agung RI Nomor : 687/K/Pid.Sus/2012)***

Telah dipertahankan di hadapan majelis pengujian yang dibentuk oleh
program strata satu Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” dan
dinyatakan lulus dalam sidang ujian pada.....,.....,.....

Majelis pengujian,
Ketua,

.....

Pengujian I,

Pengujian II,

.....

.....

Disahkan di Jakarta,.....
Pembantu Ketua I,

.....

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA**

Bahwa isi / materi skripsi yang berjudul :

“Analisis Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Pada Wilayah Kota Surabaya Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 687/K/Pid.Sus/2012)

Seluruhnya tanggung jawab ilmiah dan tanggung jawab moral Penulis

Jakarta

Penulis,

Aa Muhamad Zaenudin

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : Analisis Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Pada Wilayah Kota Surabaya Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 687/K/Pid.Sus/2012)

NAMA : AA MUHAMAD ZAENUDIN

NPM : 1307350053

KATA KUNCI : Upah minimum, Tindak Pidana, Pekerja/Buruh, Pengusaha

Upah minimum merupakan hak pekerja yang mana undang-undang ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha agar membayar upah tidak lebih rendah dari upah minimum, jika pengusaha membayar upah dibawah minimum maka hal itu menjadi suatu perbuatan pidana, permasalahan ini mengemuka dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 687/K/Pid.sus/2012 dimana pengusaha UD. Terang Suara Tjioe Christina Chandra dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya secara pidana karena membayar upah pekerja dibawah upah minimum kota Surabaya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan, studi dokumen melalui buku atau literatur. Dengan memakai teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori tanggung jawab hukum sebagai pisau analisisnya.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada awalnya membebaskan Tjioe Christina Chandra dengan alasan error in persona, namun Mahkamah Agung menilai *judex factie* telah salah menerapkan hukum sehingga dalam putusan Kasasi Nomor : 687/K/Pid.sus/2012 Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut sekaligus memvonis Tjioe Christina Chandra sesuai tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Putusan Kasasi Nomor : 687/K/Pid.sus/2012 menjadi pelajaran bagi setiap orang agar mentaati peraturan perundang-undangan yang ada.

Meskipun membayar upah minimum adalah suatu kewajiban untuk pengusaha tetapi dalam kenyataannya masih banyak pengusaha yang masih membayar pekerjanya dibawah upah minimum dengan alasan ketidakmampuan, namun apabila pengusaha tidak mampu sebetulnya ada cara untuk tidak membayar upah minimum yaitu dengan mengajukan penangguhan pembayaran upah kepada Gubernur, sehingga alasan ketidakmampuan dalam membayar upah minimum hanya dibuat-buat saja demi sebuah pencarian keuntungan yang lebih besar.

Kasus yang dialami oleh Tjioe Christina Chandra sebetulnya tidak perlu terjadi apabila pengusaha dan pekerja memaksimalkan forum musyawarah demi hubungan industrial yang harmonis dan dinamis.

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat tuhan yang maha esa dan puji syukur kehadirat Nya, yang telah melimpahkan rahmat, Taufik dan Hidayah Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Pada Wilayah Kota Surabaya Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 687/K/Pid.Sus/2012)” yang merupakan kewajiban bagi mahasiswa program strata satu Ilmu Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM untuk memenuhi dan melengkapi sebagian persyaratan dan tugas akhir untuk mencapai Gelar Sarjana Ilmu hukum.

Dalam penulisan Skripsi ini, sudah barang tentu penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, yang sangat bermanfaat bagi penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan terimakasih atas bantuan dan bimbingannya kepada :

1. Bapak Dr. H. Edy Susanto S.H.,M.H.,M.A. selaku Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.
2. Kedua orang tua, keluarga besar yang telah memberikan semangat dan dorongan serta motivasinya.
3. Bapak Dr. Gindo L.Tobing.S.H.,M.H. selaku Pembimbing.
4. Seluruh Staff pengajar dan karyawan pada Program Strata Satu Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.
5. Keluarga besar Serikat Pekerja GSPMII.
6. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat guna penyempurnaan skripsi ini, agar dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat berguna bagi semua pihak yang sempat membacanya, serta menambah bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang berkepentingan dengan masalah ini.

Jakarta,

Aa Muhamad Zaenudin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERTANGGUNGJAWABAN MATERI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengupahan	12
1. Upah Minimum.....	12
2. Penetapan Kebutuhan Hidup Layak	20
3. Penetapan Upah Minimum Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015.....	23
B. Tindak Pidana	26
1. Jenis Tindak Pidana.....	30
2. Pejabat Penyidik.....	32
3. Jenis Pidana Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.....	32
C. Landasan Teori.....	35
1. Teori keadilan.....	35
2. Teori Kepastian Hukum.....	37
3. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	38
BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO : 1397/PID.B/2010/PN JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO : NO. 687 K/PID.SUS/2012	41
A. Kasus Posisi.....	41
B. Prosedur Penegakkan Hukum Pidana ketenagakerjaan.....	43
1. Pengawasan Ketenagakerjaan	43
2. Penyidikan.....	44
3. Penuntutan.....	45
C. Perbandingan Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung RI.....	46
1. Pertimbangan Hukum Pengadilan Surabaya.....	48
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung	49
3. Analisis.....	51

BAB IV SEBAB-SEBAB PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH DIBAWAH MINIMUM.....	58
A. Ketentuan Upah Minimum Kota Surabaya Tahun 2009.....	58
B. Alasan Pengusaha Membayar Upah Dibawah Minimum.....	60
1. Faktor Ketidakmampuan.....	60
2. Kesengajaan.....	64
3. Motif Mencari Keuntungan.....	66
 BAB V PENUTUP.....	 68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
 DAFTAR PUSTAKA	 70-72

